

**SALAM REDAKSI**

# Penguatan Fondasi Multikulturalisme dalam Masyarakat Indonesia

Jurnal kita kali ini mengangkat masalah sangat krusial bagi perikehidupan sosial dan pembentukan nasionalisme kebangsaan Indonesia yaitu multikulturalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah ini kita angkat karena masih banyak kekerasan sosial etnisitas dan keagamaan terjadi di masyarakat di tengah demokratisasi yang kita kembangkan selama ini. Pertanyaan muncul bagaimana mengatasi masalah ini di tengah pluralisme yang ada dalam kerangka pengembangan demokrasi kita. Kita harus mampu mengatasi kekerasan dalam radikalisme dan fundamentalisme etnisitas dan keagamaan ini bukan hanya karena kecenderungan ini destruktif terhadap kehidupan sosial, tetapi juga untuk transformasi kehidupan sosial kita menuju penguatan nasionalisme dan kebangsaan Indonesia.

Pembentukan kebangsaan Indonesia demokratis menjadi kepedulian kita bersama. Kementerian Komunikasi dan Informasi sangat peduli dengan

masalah ini. Bagi kita pluralisme merupakan fakta sosial yang tidak bisa terelakkan, bukan hanya secara historis dalam pembentukan kebangsaan Indonesia, tetapi juga dalam kehidupan yang semakin maju sekarang berbagai subjek person dan kelompok dari latar belakang sosial berbeda dipertemukan oleh kemajuan informasi, pengetahuan, komunikasi dan gerak mobilitas penduduk lintas sosial-budaya. Pengembangan demokrasi kebangsaan multikultural dalam konteks ini menjadi kebutuhan kita bersama untuk memperkuat nasionalisme dan kebangsaan Indonesia.

Menjawab kebutuhan ini, berbagai kalangan ahli, pengambil kebijakan, pengamat dan praktisi kita undang disini untuk memberikan analisis dan memberikan pendapat dan pandangan mereka tentang masalah ini. Maksud kita dengan analisis mendalam tentang masalah ini, melihatnya dari berbagai sudut pandang dan dimensi melingkupi masa-

lah ini, kita berharap ditemukan pengkayaan pemahaman dan pemecahan komprehensif atas masalah ini. Berbagai pendapat dan pandangan ini kita ajukan jauh dari pretensi untuk mengatasi masalah ini dari sudut kita pengelola jurnal dan penulis saja, tetapi kita berharap mendapat respon dan kepedulian dari kalangan pembaca secara luas untuk memikirkan dan memecahkan masalah ini.

Paparan pertama kita sajikan tulisan Frans Viki DeDjalong 'Pluralisme dan Demokrasi: Menuju Politik Kewarganegaraan', sebagai pembuka analisis kritis atas kondisi kebangsaan kita selama ini. Dalam paparannya, DeDjalong mengajak kita untuk memeriksa kembali pembentukan bangsa kita yang masih diwarnai dilema dan ketegangan antara politik identitas dan politik kewarganegaraan. Dilema dan ketegangan ini hingga sekarang belum tuntas kita pecahkan, cenderung mencari politik jalan keluar yang bersifat darurat (*exit*) sehingga ketegangan dan kekerasan so-

sial masih terus terjadi.

Dikatakan, pembentukan bangsa dan transformasi kewarganegaraan di masa pemerintahan Sukarno sesungguhnya belum tuntas dilakukan. Namun, tidak dilanjutkan pada masa Orde Baru. Sebaliknya, hal itu tidak dianggap penting dan Orde Baru lebih menekankan pada *developmentalisme* pembangunan ekonomi dan pembentukan kebangsaan menurut kategori ekonomi liberal manusia individual dengan segala kepentingan ekonomi, dengan tidak menggarap tuntas masalah politik identitas dan kewarganegaraan, Artikulasi politik identitas dan kewarganegaraan dijawab dengan otoritarianisme negara, sehingga konflik dan benturan sosial seringkali tidak terhindarkan antara negara dan rakyat.

Pengembangan kebangsaan demokratis multikultural ke depan, menurut DeDjalong, penting menjawab dilema politik identitas dan kewarganegaraan ini dengan melakukan transformasi subjek politik identitas menuju politik kewarganegaraan. Imajinasi dan fantasi mengenai kebangsaan Indonesia didasarkan pada demokrasi kewarganegaraan dengan segala kesetaraan hak dan status sebagai warga negara. Menggarap politik kewarganegaraan penting dalam konteks multikulturalisme sekarang, tidak hanya dengan politik jalan keluar serba darurat, tetapi lebih komprehensif membentuk kebangsaan berdasar *equivalensi* di antara warga negara. Adalah menjadi tugas kita semua komponen bangsa untuk mengeluarkan fantasi politik identitas berdasar etnisitas dan keagamaan dan mentransformasikannya menuju politik kewarganegaraan dalam kehidupan politik moderen Indonesia.

Saifudin Zuhri, dalam tulisan 'Agama dan Multikulturalisme dalam Bingkai NKRI' mengelaborasi agama dari sudut pandang potensi konflik atau pertentangan antara agama dan bagaimana kehidupan beragama ditempatkan dalam konteks kehidupan sosial untuk mencapai perdamaian dan kohesi sosial. Elaborasi ini penting karena menyangkut masalah fundamental nilai keyakinan agama dan sekaligus bagaimana hal itu ditempatkan dalam praksis kehidupan sosial.

Saifudin menekankan agama harus ditempatkan bukan hanya pada tataran teologis keyakinan batin personal atau komunitas saja yang memang harus dihormati keberadaannya. Tetapi,

keyakinan itu harus memancar keluar dan memberi efek pada kemaslahatan hidup bersama. Faktanya adalah keberagaman agama atau pluralisme merupakan realitas sosial yang tidak mungkin dihindari dalam kehidupan yang semakin terkait satu sama lain dalam era moderen sekarang. Karenanya, pertemuan, komunikasi, dan dialog antara agama menjadi mutlak untuk pembentukan kehidupan sosial bersama. Kebutuhan hidup bersama di ranah publik harus disertai sikap menghormati dan menghargai keberagaman dalam hubungan dialogis untuk mencapai kemaslahatan dan kebaikan hidup bersama. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, Saifudin menekankan keberagaman yang dialogis demikian itu hendaknya dijadikan pijakan dalam menjalankan kehidupan publik bersama.

S. Bayu Wahyono, dalam tulisan 'Krisis Kebangsaan, Humaniora dan Pendidikan Multikulturalisme' mengemukakan keprihatinan atas krisis kebangsaan yang dialami bangsa dan perlunya pendidikan berkarakter nasionalis dan humanis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai peristiwa kekerasan sosial komunal antar kelompok agama yang terjadi di tanah air dinilai merupakan bentuk krisis kebangsaan yang bersumber dari krisis nilai kemanusiaan dalam kehidupan sosial. Bayu menekankan nasionalisme Indonesia adalah humanisme. Sebagaimana ditunjukkan para pendiri bangsa, Indonesia dibangun di atas landasan kemanusiaan, bukan hanya pada tataran nilai ideal tetapi juga dalam praksis sosial.

Bayu menekankan nilai dan praktek sosial demikian harus dikembangkan dalam pembentukan karakter bangsa dan praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengambil contoh model pendidikan Ki Hadjar Dewantoro, Bayu menekankan pintar otak saja tidak cukup, tetapi harus disertai budi pekerti yang bersumber dari nilai kemanusiaan. Kearifan lokal, ditekankan Bayu, adalah bentuk lain dari praktek sosial menghargai humanisme. Kearifan lokal lahir dari kebutuhan untuk hidup bersama dalam komunitas dari berbagai macam kepentingan warga masyarakat yang berbeda latar belakang sosial. Untuk menjadikan kehidupan bersama tetap berlangsung, nilai kemanusiaan dijadikan sebagai panglima, untuk menepis kepentingan sempit partikular

diantara warga masyarakat menuju kebaikan hidup bersama.

Tatangan utama yang dihadapi adalah masih adanya sikap anti pluralisme dan anti multikulturalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap demikian pada dasarnya anti sosial dan dibalik itu anti nasionalisme berlandaskan humanisme yang berakibat menimbulkan sikap dan tindakan pemaksaan kehendak dan kekerasan sosial. Karena itu, pendidikan multikulturalisme sebagai pembentuk karakter bangsa yang nasionalis dan humanis penting dikedepankan. Pendidikan nasional harus dijalankan sedemikian rupa menuju ke pembentukan sikap nasionalisme yang menjunjung tinggi kemanusiaan untuk mengatasi krisis kebangsaan yang terjadi sekarang sekaligus membentuk karakter bangsa ke depan.

Sementara itu, J. Sumardi-yanto dalam tulisannya yang berjudul Pendidikan Karakter Berbasis Keberagaman Universum Nilai juga menekankan pentingnya humanisme dalam membangun dan membentuk watak siswa agar menjadi bangsa yang berkarakter kuat. Dengan merujuk pada berbagai tokoh dan filsuf dunia, Sumardi-yanto optimis bahwa pembentukan jiwa merdeka, toleran, mandiri, dan cinta pada sesama manusia pada kalangan siswa, akan menjadi modal berharga dalam mendorong Indonesia yang lebih bermartabat.

Sejalan dengan analisis dan paparan ini, dalam tulisan 'Menyuburkan Multikulturalisme melalui Pendidikan Damai (Peacebuilding Education), A.

Ferry T. Indratno menekankan pentingnya pendidikan damai untuk mengatasi masalah fundamentalisme dan kekerasan dengan menghormati multikulturalisme dalam kehidupan sosial dan berbangsa. Ditekankan, pendidikan damai merupakan media strategis untuk membentuk kesadaran multikulturalisme guna mengembangkan praktek kehidupan sosial yang damai dan berkeadilan.

Dalam konteks Indonesia, telah dikembangkan sebuah model pendidikan damai yang menekankan kesadaran multikulturalisme untuk mengatasi fundamentalisme sosial etnisitas dan agama. Mengambil contoh model UPPI (Ustaz, Priest, Pastor dan Imam) yang di jalankan di berbagai kawasan, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain, sebuah model pendidikan damai yang dikembangkan di Maluku Utara oleh *World Vision* untuk transformasi kultural yang bertujuan mendorong dan menstabilkan kehidupan sosial masyarakat yang terkena konflik. Transformasi dimaksud dilakukan dalam bentuk pengajaran pendidikan damai agar warga masyarakat melek religius, kultural dan politik, paham tentang konflik yang seringkali disebabkan oleh sempitnya wawasan, prasangka, kemiskinan dan ketidakadilan. Melalui praktek pendidikan dan didukung oleh penerbitan majalah Harmonis, pendidikan damai dikembangkan untuk menghargai perbedaan, membangun kerjasama, pembentukan visi, dan pemecahan masalah sosial secara kreatif.

Ferry menekankan, praktek

pendidikan damai demikian tidak hanya perlu dikembangkan di daerah, tetapi juga penting untuk dikembangkan di tingkat nasional. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 menekankan (pasal 4 ayat 1) 'Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa'. Mengacu pada Undang-Undang Sisdiknas ini, pendidikan damai untuk mengatasi fundamentalisme sosial dan agama menuju transformasi kultural keberagaman sosial bisa dikembangkan. Mengambil model pendidikan yang telah dijalankan di Maluku Utara, model pendidikan damai dapat dikembangkan di daerah-daerah lain di Indonesia.

Dalam tulisan 'Gender, Perempuan dan Dilema Multikulturalisme', Sri Raviana mengangkat masalah ketidakadilan gender sebagai bagian penting dalam pengembangan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Raviana menekankan ketidakadilan gender masih banyak dialami kaum perempuan dalam praktek sosial yang menganut budaya patriarki atau dalam struktur kekuasaan bersifat patrimonial. Diskrimansi seringkali dialami kaum perempuan dalam praktek yang berakibat pada ekresi sosial dan kekerasan terhadap kaum perempuan. Hal itu tidak hanya dialami di ranah domestik, bahkan di ranah publik terbuka sekalipun. Dalam soal pekerjaan, misalnya, diskrimi-

nasi dan tekanan moral masih banyak dialami kaum perempuan, menyebabkan terjadi kekerasan terhadap perempuan di ranah publik.

Ditekankan Raviana bahwa ketidakadilan gender merupakan persoalan utama yang dihadapi dalam diskriminasi kaum perempuan, baik di ranah domestik maupun publik, dalam lingkup pekerjaan maupun peran publik yang lain dalam kehidupan sosial-ekonomi maupun politik dan kebudayaan. Pembagian kerja secara seksual mendiskriminasi kaum perempuan masih umum ditemukan, sehingga kaum perempuan tidak mendapat hak dan status setara dalam kehidupan publik. Dalam konteks demokrasi dan penghormatan terhadap multikulturalisme demikian itu problematik karena demokrasi memberikan hak sama terhadap warga negara. Ketidakadilan gender juga menempatkan multikulturalisme menjadi terpinggirkan.

Mengatasi masalah ketidakadilan ini, pengembangan demokrasi multikultural yang menjadikan setiap warga negara memiliki hak dan status yang sama dalam kehidupan publik penting dilakukan. Emansipasi dan transformasi menuju kehidupan sosial lebih egalitar patut dikembangkan. Pengembangan demokrasi multikultural yang menjunjung tinggi kewarganegaraan ini tidak hanya penting untuk kesetaraan dan keadilan gender yang menempatkan kaum perempuan sebagai warga negara dengan segala hak dan status yang dimiliki sebagai subjek warganegara, tetapi juga

penting untuk pengembangan demokrasi sosial menuju kehidupan sosial yang lebih demokratis dan menghargai perbedaan dan kesetaraan dalam kehidupan publik. Mulai dari emansipasi kesetaraan gender ini, kesetaraan di ranah kehidupan publik pada umumnya lambat laun bisa dicapai dalam kehidupan publik kita. Keadilan dan kesetaraan serta keadilan gender perlu dikembangkan menuju keadilan dan kesetaraan sosial. Demikian itu penting dilakukan sebagai bagian dari pengembangan solidaritas sosial dan pembentukan nasionalisme dan kebangsaan multikultural.

Berbagai paparan diatas memberikan acuan pada kita bagaimana mengatasi kekerasan sosial dengan melakukan transformasi sosial menuju perikehidupan sosial dan politik yang harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita berharap paparan analisis ini memberikan pemahaman kita lebih komprehensif dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya transformasi sosial menuju kebangsaan multikultural demokratis Indonesia modern dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.\*\*\*



*Redaksi*